EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.4, Mei 2024

Framing Kecurangan Menjelang Pemilu 2024 dalam Film "Dirty Vote"

Eugene A.M.K. Satata[1], Daniel Luther.C. Korompis[2], Mikael Dimas[3]
[1,2,3]Universitas Kristen Indonesia
E-mail: chellasatata18@gmail.com[1], 150491daniel@gmail.com [2], mikaeldimas24@gmail.com[3]

Article History:
Received: 01 Mei 2024
Revised: 13 Mei 2024
Accepted: 15 Mei 2024

Keywords: *Framing, Kecurangan Pemilu, Film*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaian mengenai kecurangan pemilu 2024 dalam film dokumenter "Dirty Vote". Hasil dari analisis framing film dokumenter "Dirty Vote", yakni film "Dirty Vote" menggambarkan kecurangan sebagai suatu strategis sistematis yang menjadi ancaman serius bagi sistem demokrasi terpenting, yakni pemilu. Kecurangan juga digambarkan sebagai manipulasi dan pelanggaran terhadap hukum. Penelitian ini menggunakan analisis framing model Gamson dan Modigliani, dengan perangkat framing device dan reasoning device yang dihadirkan dalam film dokumenter tersebut. Dengan metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data berdasarkan film tersebut.*

PENDAHULUAN

Teknologi terus mengalami perkembangan dan pembaharuan yang kian pesat. Salah satu bentuk pembaharuan tersebut yakni dengan kemunculan media sosial. Media sosial menjadi salah satu bentuk dari inovasi teknologi yang mengubah cara orang berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung satu sama lain. Media Sosial merupakan istilah yang merujuk kepada teknologi digital yang memfasilitasi setiap orang untuk terhubung, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi konten melalui berbagai platform online (Lewis, 2010).

Media sosial sebagai *platform online* yang memungkinkan pengguna untuk menyajikan diri, berkomunikasi, bekerja sama, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan pengguna lainnya (Nasrullah, 2015). Media sosial dan keterlibatan publik di dalamnya menciptakan kekuatan baru dalam membentuk tatanan sosial politik, dimana perkembangan teknologi digital ini memberikan ruang baru bagi publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan perpolitikan (Elizamiharti & Nelfira,2024). Hal ini sejalan dengan tiga klaim yang mendukung demokrasi digital atau (Tsagarousianou, 1999): a) Demokrasi digital atau *cyber* meningkatkan akses dan pertukaran informasi politik antara pemerintah, perwakilan, administrasi publik, organisasi politik dan masyarakat, serta warga negara perorangan; b) Demokrasi digital atau *cyber* mendukung diskusi ataupun perdebatan publik, musyawarah, dan pembentukan komunitas; c) Demokrasi digital atau *cyber* meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Salah satu bentuk partisipasi demokrasi digital melalui media sosial adalah dengan pembuatan konten seperti film mengenai isu-isu politik. Saat ini film tidak hanya tayang melalui layar lebar atau bioskop, namun dapat juga tayang dan ditonton melalui *platform* media sosial. Misalnya film "Dirty Vote"

Film "Dirty Vote" tayang perdana pada tanggal 11 Februari 2024 melalui saluran YouTube

bernama Dirty Vote, film berdurasi hampir 2 jam, yakni 1:57:22 ini telah ditonton sebanyak 9,8 juta kali. Film ini merupakan sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Laksono. Film ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara Indonesia, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, mereka berbagi pandangan dan analisis mereka tentang isu kecurangan dalam konteks pemilu. Para ahli tersebut mengungkapkan bahwa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk mencapai tujuan memenangkan pemilu, termasuk penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat yang dipertontonkan secara terbuka tanpa rasa malu demi mempertahankan status quo.

Film "Dirty Vote" mengungkap berbagai isu menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Film ini menyoroti peta suara Sumatera Pilpres 2014 dan 2019 Mulai dari pemecahan Papua menjadi 6 Provinsi, penunjukan 20 PJ Gubernur dan 82 PJ Walikota/Bupati oleh Presiden, hingga kewenangan Jenderal Tito Karnavian. Film ini juga mengkritik pelanggaran keputusan MK dalam penunjukan kepala daerah, relasi PJ Gubernur dengan Presiden, dan kecenderungan tidak netral PJ Gubernur dan Bupati.

Film "Dirty Vote" menyoroti kewenangan PJ kepala daerah melarang kampanye, kontroversi deklarasi desa bersatu untuk mendukung paslon tertentu, dan politisasi kasus penyelewengan dana desa. Film ini mengungkapkan tekanan kepada kepala desa untuk mendukung paslon tertentu, dan kenaikan gaji ASN, Polri, dan pensiunan PNS pada tahun 2024. Film ini juga berisi kritik pengabaian data Kemensos dalam penyaluran bansos, penggunaan bansos sebagai alat politik, dan ketidaknetralan Presiden dan menteri-menteri di pihak koalisi 02. Selain itu, film "Dirty Vote" menyoroti ketidakprofesionalan Bawaslu dan KPU, hubungan putusan MK dengan pelanggaran KPU, serta kritik terhadap ketua KPU yang mendapatkan peringatan keras berulang kali dan kontroversi putusan MK.

Berdasarkan isi dari film "Dirty Vote" tersebut, film tersebut memberikan gambaran mengenai kelamnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dipenuhi oleh berbagai kecurangan dan pelanggaran di dalamnya. Hal tersebut dapat membuat film bukan hanya sekedar untuk memberikan hiburan, tetapi juga memberikan pendidikan dan penerangan (Effendy, 2003, p. 209). Sehingga film memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik perspektif publik terhadap suatu hal, selain itu film dapat dibuat dengan tujuan untuk menghibur, edukatif, atau propaganda (Hubatullah, 2023). Film memberikan dampak tertentu kepada penonton, seperti dampak sosial dan dampak psikologis (Oktavianus, 2015).

Dalam penelitian ini, *framing* menjadi alat untuk mengetahui pesan terkait isu kecurangan pemilu 2024. *Framing* memiliki dua aspek penting, yakni memilih realitas dan menuliskan fakta. Dalam memilih realitas/fakta, terdapat dua kemungkinan yaitu apa yang dipilih dan apa yang dibuat. Hal ini berarti bahwa suatu peristiwa dilihat dan disajikan dari satu sisi tertentu. Selanjutnya aspek kedua yakni menuliskan fakta, melibatkan penyajian peristiwa dengan kata, kalimat, serta foto/gambar. Fakta yang dipilih menekankan suatu tujuan tertentu, seperti pada pemberian label tertentu, pengulangan *keyword* atau kata kunci, penggunaan gambar/foto yang mencolok, serta penggunaan headline yang provokatif (Eriyanto, 2002).

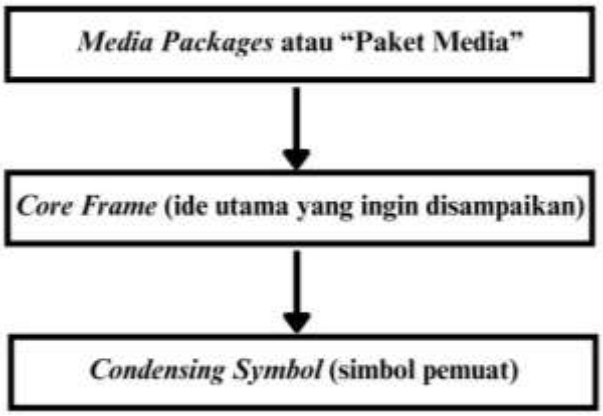
Penelitian yang dilakukan oleh Masyarrofah, dkk. (2017) menunjukkan bagaimana *framing* dapat digunakan untuk mengemas isu poligami dalam film "Surga Yang Tak Dirindukan" dengan menggunakan analisis *framing* model Gamson dan Modigliani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembingkaian (*frame*) mengenai isu poligami melambangkan bahwa poligami sebagai "surga" yang tidak dirindukan oleh wanita. Selanjutnya Aziz, dkk. (2022) melakukan penelitian mengenai pesan lingkungan dalam film dokumenter "The Story Of Birthplace". Penelitian ini juga menggunakan analisis *framing* model Gamson dan Modigliani untuk mengetahui pembingkaian pesan yang ingin disampaikan oleh film ini. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat isu yang dibingkai

dalam beberapa *scene* agar penonton memiliki keinginan untuk menjaga lautan dari sampah.

Penelitian Masyarrofah, dkk. (2017) dan Aziz, dkk. (2022) menunjukkan bagaimana *framing* digunakan untuk mengemas isu poligami dalam film "Surga Yang Tak Dirindukan" dan pembingkaian pesan mengenai lingkungan dalam film "The Story of Birthplace". Dengan menggunakan analisis *framing* model Gamson dan Modigliani. Penelitian ini juga bermaksud untuk menggunakan model *framing* yang sama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai *framing* kecurangan pemilu tahun 2024, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penguraian bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis *framing* model Gamson dan Modigliani (1989). Model analisis *framing* model Gamson dan Modigliani berfokus pada peran media dalam membentuk pemahaman dan opini publik mengenai isu-isu sosial (Carter, 2013). Dalam penelitiannya tentang wacana media dan opini publik mengenai isu-isu sosial didasarkan pada perspektif konstruksionis, dengan mengajukan suatu skenario pembingkaian berita yang disatukan dalam konsep *media packages* atau "paket media". Paket media tersebut terdiri dari elemen-elemen yang disebut *core frame* (ide utama yang ingin disampaikan) dan *condensing symbol* (simbol pemuat). *Condensing symbol* (simbol pemuat) terdiri dari (1) lima perangkat pembingkaian (*framing devices*) yaitu *metaphors*, *exemplars*, *catchphrases*, *depiction*, dan *visual images*. (2) tiga perangkat penalaran (*reasoning devices*) yaitu *roots*, *consequences*, dan *appeal to principles* (Samsudin, 2019).



Gambar 1. Garis Besar *Framing* Model model Gamson dan Modigliani (1989)

Subjek dalam penelitian ini yakni film dokumenter "Dirty Vote" yang tayang melalui saluran YouTube pada tanggal 11 Januari 2024, serta objek penelitian ini yakni mengenai indikasi-indikasi kecurangan menjelang pemilu 2024. Indikasi-indikasi kecurangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu informasi mengenai data, pandangan, dan analisis tiga pakar hukum tata negara Indonesia tentang isu kecurangan dalam konteks pemilu yang telah digunakan untuk mencapai tujuan memenangkan pemilu. Unit sampel yang diambil untuk penelitian ini yaitu adegan dari film yang menggambarkan bentuk kecurangan. Unit pencatatan yang diambil yakni adegan atau jalan cerita yang menunjukkan kecurangan, hal ini berupa narasi, dialog, gambar data. Dalam penelitian ini, unit konteks yang disampaikan yaitu mengenai kondisi politik Indonesia menjelang pemilu 2024 dalam hal ini tentang indikasi-indikasi kecurangan. Unit konteks dalam analisis ini adalah situasi

politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menonton film “Dirty vote” dan melakukan pencatatan adegan-adegan yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Film “Dirty Vote”



Gambar 2. Poster Film “Dirty Vote”

Film "Dirty Vote" merupakan sebuah film dokumenter. Film dokumenter ini menayangkan suatu realitas berdasarkan fakta objektif serta tanpa rekayasa yang memiliki suatu nilai penting dan mendasar mengenai kehidupan (Rikarno, 2015). Film yang menampilkan tiga pakar hukum tata negara Indonesia, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar yang berbagi pandangan dan analisis mereka tentang isu kecurangan dalam konteks pemilu, tayang pada 11 Februari 2024 melalui saluran YouTube bernama Dirty Vote dengan durasi 1:57:22. Berikut ini pembagian segmen pada film “Dirty Vote”.

Tabel 1. Segmen Film “Dirty Vote”

Opening	00:00
Peta Suara Sumatera Pilpres 2014 dan 2019	00:12:35
Pemecahan Papua menjadi 6 Provinsi	00:13:47
Kewenangan yang dimiliki Jenderal Tito Karnavian	00:15:10
Penunjukan 20 PJ Gubernur dan 82 PJ Walikota/Bupati dipilih Presiden	00:16:46
Pelanggaran keputusan MK dalam penunjukan kepala daerah	00:18:01
Relasi PJ Gubernur dengan presiden	00:19:45
Kecenderungan tidak netral PJ Gubernur	00:21:40
Kecenderungan tidak netral PJ Bupati	00:22:55
Kewenangan PJ Kepala Daerah melarang kampanye	00:25:17
Kontroversi deklarasi desa bersatu untuk paslon tertentu	00:25:33
Politisasi kasus penyelewengan dana desa	00:28:41
Tekanan kepada kepala desa untuk mendukung paslon tertentu	00:30:42
Fakta bansos jelang pemilu	00:35:20
Gaji ASN, Polri, dan pensiunan PNS naik di 2024	00:38:28
Pengabaian data kemensos dalam penyaluran bansos	00:40:00
Bansos digunakan sebagai alat politik	00:42:00
Presiden tidak netral	00:53:00
Presiden dan menteri-menteri di pihak koalisi 02	00:55:50

Bawaslu dan KPU tidak profesional	00:57:32
Dugaan pelanggaran KPU	01:14:00
Hubungan putusan Mahkamah Konstitusi dan pelanggaran KPU	01:15:35
Ketua KPU mendapat peringatan keras berkali-kali	01:16:50
Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi	01:18:00
Closing dan kesimpulan ketiga ahli hukum tata negara	01:53:36

Framing Kecurangan Pemilu 2024 Dalam Film "Dirty Vote"

Dalam menganalisis *framing* model William A. Gamson dan Andre Modigliani diketahui bahwa sutradara dari film dokumenter "Dirty Vote" mengemas film ini yang berkaitan dengan kecurangan pemilu tahun 2024 dalam beberapa perangkat *framing*.

Penggunaan ***Metaphors***, kecurangan dalam pemilu 2024 diilustrasikan atau dianalogikan seperti sebuah permainan catur yang tertera jelas pada thumbnail atau poster dari film tersebut. Terdapat korelasi antara permainan catur dan kecurangan dalam pemilu 2024 yang dijelaskan dalam film dokumenter "Dirty Vote". Kecurangan pemilu 2024 yang dijelaskan dalam film tersebut sudah dirancang atau memiliki strategi yang sangat baik oleh pejabat-pejabat publik yang memiliki kepentingan. Permainan catur juga demikian, dibutuhkan strategi yang sangat baik dan cepat dalam menumbangkan lawan atau musuh kita. Oleh karena itu, kecurangan pemilu 2024 ini dianalogikan sebagai permainan catur oleh sutradara lewat poster film tersebut.

Penggunaan *Metaphors* berikutnya pada 1:53:29-1:53:35 salah satu pakar mengatakan "katakan bahwa ya putusan begini ini memperlihatkan betapa Palu Hakim, sebenarnya patah berkeping-keping di hadapan putusan Almas". Palu hakim ini diartikan sebagai simbol kekuatan dan keadilan hukum. Kalimat patah berkeping-keping mengartikan ketidakberdayaan dan kegagalan dalam menegakkan hukum yang sesuai. Hal ini menggambarkan kegagalan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum mengenai putusan batas usia presiden dan wakil presiden yang seakan-akan untuk meloloskan Gibran.

Penggunaan metaphors berikutnya pernyataan salah satu ahli pada film pada 1:53:12 tersebut mengatakan "Nah, barangkali itu barangkali, lagi-lagi itu barangkali yang bisa menjelaskan kenapa putusan itu bau anyir". Putusan yang disebut "bau anyir" ini berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini terdapat tujuan tersendiri atau kepentingan sendiri yang tidak beres. Putusan MK mengenai batasan usia pencalonan presiden dan wakil presiden memang ada sesuatu yang tidak beres atau bisa disebut "bau anyir".

Berdasarkan metafora-metafora tersebut terlihat bahwa film ini mengemas kecurangan pemilu sebagai pembentukan strategi yang sistematis. Strategi yang sudah diatur sedemikian rupa akan berjalan apabila melibatkan pihak-pihak berkuasa lainnya agar strategi kecurangan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, kecurangan sebagai suatu hal yang berdampak besar dan luas, seperti bagaimana lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi dapat dilemahkan penegakan hukumnya.

Penggunaan ***Catchphrases***, berupa slogan yaitu bahwa "pemilu kita sedang tidak baik-baik saja" (0:34). Film ini menggambarkan kecurangan sebagai suatu ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. Kecurangan dibingkai sebagai faktor utama yang membuat proses demokrasi menjelang pemilu berjalan dengan tidak baik. Seperti kejanggalan tersebut dimulai dari bansos yang digunakan untuk alat politik meraup suara, penunjukan PJ Kepala Daerah yang wewenangnya dapat digunakan untuk kepentingan politik, pejabat publik yang tidak netral serta kurangnya kompeten dari BAWASLU dan KPU. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kecurangan dapat merusak sistem dalam proses pemilu, yang merupakan bagian terpenting dari demokrasi.

Penggunaan *Catchphrases* yang berikutnya, pada akhir film dokumenter salah satu pakar mengatakan "menyusun dan menjalankan skenario kotor ini tak perlu kecerdasan dan kepintaran, yang diperlukan cuma dua yaitu mental culas dan tahan malu" (1:54:37 - 1:54:48). Dalam hal ini, kecurangan dibingkai sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral. Dikatakan tidak bermoral karena kecurangan terjadi karena adanya sikap licik dan sangat ingin menang. Selain itu, kecurangan dibingkai sebagai tindakan yang tidak terhormat karena dilakukan dengan tidak ada rasa penyesalan atau sesal. Dalam film "Dirty Vote" , hal tersebut dapat terlihat dari segmen mengenai pergerakan politik menjelang pemilu 2024 yang mana Mahkamah Konstitusi seakan-akan meloloskan Gibran dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Presiden Jokowi saat itu pada saat di wawancara oleh wartawan menjawab dengan pernyataan seakan-akan beliau tidak pernah mencampuri hal tersebut. Sifat tahan malu yang muncul adalah ketika semua orang sudah menduga andil presiden pada pencalonan Gibran, presiden tetap tidak memberi komentar banyak.

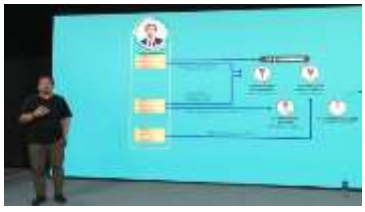
Exemplar, yaitu perbandingan-perbandingan yang ada. Dalam film dokumenter ini, pada 13:48-14:31 terdapat perbandingan yang disampaikan oleh salah satu ahli. Hal ini perbandingan antara posisi 4 provinsi baru di Papua yang langsung mengikuti pemilu 2024, sedangkan Kalimantan Utara pada waktu itu diresmikan tahun 2013 tidak dapat mengikuti pemilu 2014 melainkan mengikuti pemilu 2019. Film ini penggambaran adanya perubahan aturan atau kebijakan yang kurang jelas mengapa terjadi perubahan aturan/kebijakan menjelang pemilu 2024.

Kemudian, terdapat dialog pada menit 1:29:40 "biasanya kalau dicabut bukannya dikeluarkan e.. apa penetapan? lalu dijawab "Ya itu uniknya perkara ini, sehingga disebut kunci. Seharusnya ketika penetapan atau pencabutan, penetapan dikeluarkan dilakukan pembacaan sidang penetapan pencabutan perkara anehnya itu tidak." Film ini menunjukkan bahwa kecurangan dibingkai sebagai suatu hal yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada dengan merubah atau memanipulasi aturan yang ada. Dalam pembingkaian ini, kecurangan digambarkan sebagai keadaan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan.

Depiction, di dalam film dokumenter Dirty Vote disebutkan bahwa media massa nasional mengatakan Gibran "anak haram demokrasi" (1:22:18). Citra yang muncul pada Gibran dikarenakan hal-hal kontroversial yang berhubungan dengan dirinya. Dalam dokumenter ini, Gibran menjadi puncak dari kecurangan pemilu 2024 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diubah hanya untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Ketua MK yaitu Anwar Usman berperan penting dalam berubahnya batas usia calon presiden dan wakil presiden yang mana beliau juga adalah paman dari Gibran. Dalam hal ini bahwa kecurangan pemilu dibingkai sebagai manipulasi terhadap hukum, kecurangan sebagai contoh nyata lemahnya sistem politik dan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada seperti adanya nepotisme atau penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kecurangan dibingkai sebagai tindakan yang menghalangi lahirnya pemimpin terbaik.

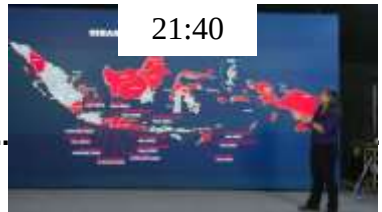
Visual Image, gambar yang memperlihatkan penekanan mengenai kecurangan menjelang pemilu 2024.

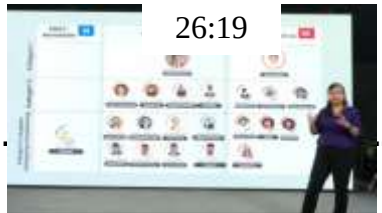












34:27



41:28



48:55



56:28

1:08:43

1:16:08



1:37:47

Gambar-gambar tersebut menunjukkan beberapa adegan dalam film "Dirty Vote" yang memperlihatkan informasi-informasi mengenai kecurangan menjelang pemilu 2024. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa kecurangan dalam menjelang pemilu 2024 adalah sebuat dibingkai sebagai tindakan yang memang telah dirancang/disusun dan nyata adanya.

Penggunaan ***Roots***, pada 1:39:27 – 1:39:42 terdapat dialog yang mengatakan "Gibran diperbolehkan mencalon, saya sedikit marah dan sampai mengatakan saya gugat anda nanti karena anda mengganggu mimpi saya soal betapa indahnya demokrasi di Indonesia sekarang setelah terbangun rasa-rasanya demokrasi jadikan buruk". Kecurangan pemilu 2024 sebagai suatu hal yang merusak demokrasi yang awalnya indah menjadi buruk. Kecurangan digambarkan memberikan dampak yakni masyarakat menjadi kecewa terhadap kenyataan demokrasi di Indonesia yang tidak sesuai harapan mereka serta turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada saat ini.

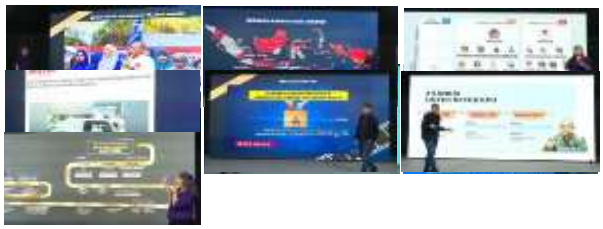
Penggunaan ***Appeals to principle*** yang merupakan klaim moral, "tolong jadikan film ini landasan untuk anda melakukan penghukuman" (0:14), "banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa" (0:28-0:33), "film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah memainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka" (0:47-1:00). Kecurangan menjelang pemilu perlu menjadi perhatian luas dari masyarakat. Diperlukan kepedulian dari masyarakat agar proses demokrasi ini dapat berjalan dengan baik, dengan "buka mata" terhadap indikasi-indikasi kecurangan yang dapat merusak pemilu sebagai bagian terpenting dari demokrasi. Sebab dengan kepedulian masyarakat mengenai hal ini, maka menjadi penentu hadirnya pemimpin terbaik bagi bangsa ini.

Consequences, "…telah terjadi kecurangan yang luar biasa" (0:28-0:33), "…politisi telah memainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka" (0:47-1:00),

"kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu" (1:02-1:06). *Framing* mengenai kecurangan suatu hal "luar biasa" dan "tidak bisa dianggap baik-baik saja" dapat merusak kepercayaan publik dalam proses pemilu/demokrasi yang sedang berjalan, hal ini dapat menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, lalu *framing* kecurangan yang dilakukan politisi "mempermainkan publik pemilih" dan "memenangkan kepentingan mereka" dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap politisi maupun instansi politik. Kemudian, *framing* kecurangan sebagai suatu hal yang "tidak boleh didiamkan" dapat membuat publik mengambil sebuah tindakan seperti protes, demo, melakukan penuntutan.

Tabel 2. Hasil Analisis *Framing* Film "Dirty Vote"

Perangkat Pembingkaian (*Framing Devices*)	**Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*)**
Elemen dalam film dokumenter yang digunakan untuk mendukung penggambaran suatu konteks atau isu yang diangkat. Dalam hal ini, mengenai kecurangan dalam proses menjelang pemilu 2024 pada film "Dirty Vote", dimana kecurangan dibingkai sebagai suatu strategi sistematis dan merupakan ancaman serius dalam proses demokrasi	Elemen dalam film dokumenter yang membantu memahami dan mengatasi suatu konteks atau isu yang diangkat. Dalam hal ini, mengenai kecurangan dalam proses menjelang pemilu 2024 pada film "Dirty Vote", kecurangan dibingkai sebagai perbuatan tidak bermoral dan tidak boleh didiamkan, serta kecurangan memiliki dampak signifikan terhadap proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Komponen Perangkat Pembingkaian (*Framing Devices*)	**Komponen Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*)**
Metaphor, yakni pengandaian atau perumpamaan. Dalam film "Dirty Vote" kecurangan pemilu dianalogikan seperti permainan catur, sehingga kecurangan sebagai pembentukan strategi yang sistematis. Strategi yang sudah diatur sedemikian rupa akan berjalan apabila melibatkan pihak-pihak berkuasa.	*Roots*, yakni analisis sebab-akibat. Dalam film "Dirty Vote", adanya kecurangan menjelang pemilu 2024 menyebabkan rusaknya keindahan demokrasi serta menimbulkan kekecewaan dan turunnya kepercayaan dari masyarakat menjadi terhadap pemerintahan yang ada saat ini.
Exemplars, yakni berupa uraian yang menghubungkan pembingkaian dengan contoh yang konkret. Contoh ini dapat berupa perbandingan untuk memperjelas dan memperkuat perspektif mengenai isu yang dibingkai. Dalam film "Dirty Vote" menunjukkan bahwa kecurangan dibingkai sebagai suatu hal yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada dengan merubah atau memanipulasi aturan yang ada. Dengan melakukan perbandingan terhadap suatu aturan yang seharusnya diterapkan dengan kenyataan yang ada.	*Consequences*, yakni konsekuensi dari isu yang dibingkai. Dalam film "Dirty Vote, kecurangan menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses menjelang pemilu serta dapat membuat publik mengambil sebuah tindakan seperti protes, demo, melakukan penuntutan.
Catchphrases, yakni kalimat/ ungkapan yang menarik, kontras, serta mencolok dalam suatu dialog. Biasanya berupa jargon atau slogan. Dalam film "Dirty Vote" terdapat beberapa kalimat seperti "pemilu kita sedang tidak baik-baik saja" dan "menyusun dan menjalankan skenario kotor ini tak perlu kecerdasan dan kepintaran, yang diperlukan Cuma dua yaitu mental culas dan tahan malu". Kedua kalimat tersebut menunjukkan bahwa kecurangan dibingkai sebagai suatu tindakan tidak bermoral yang menjadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia.	*Appeal to Principles*, yakni klaim moral yang dapat diambil dari isu yang diangkat. Dalam film "Dirty Vote", pesan yang dapat diambil bahwa sebagai masyarakat perlu memperhatikan dan peduli mengenai bagaimana proses menjelang pemilu berjalan, serta dapat dengan jeli melihat indikasi-indikasi kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi. Sehingga proses demokrasi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan hadirnya pemimpin terbaik bagi bangsa ini.
Depiction, yakni penggambaran suatu isu menggunakan kata, kalimat, atau istilah yang bermakna konotatif. Dalam film "Dirty Vote", kecurangan pemilu dibingkai sebagai manipulasi dan pelanggaran terhadap hukum, serta lemahnya sistem politik. Selain itu, kecurangan sebagai tindakan yang menghalangi lahirnya pemimpin	

terbaik. Seperti terdapat *scene* dalam film 1:22:18 yang menyatakan bahwa media massa nasional mengatakan Gibran "anak haram demokrasi"
Visual Images, yakni penggunaan gambar, foto, tabel, atau visualisasi lainnya yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan isu dengan lebih jelas. Dalam film "Dirty Vote" terdapat beberapa gambar/foto/tabel, sebagai berikut :  Gambar/foto/bagan dalam film "Dirty Vote" menunjukkan bahwa kecurangan menjelang pemilu 2024 memang benar adanya dan telah dirancang dan disusun secara sistematis.

KESIMPULAN

Film dokumenter "Dirty Vote" menggambarkan kecurangan yang sangat besar dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia. Melalui 3 pakar ahli tata hukum negara, film ini menampilkan berbagai cara untuk memanipulasi yang diduga terjadi. Kecurangan ini disajikan bertahap melalui tindakan yang tidak etis pada pejabat-pejabat publik, dana pemerintah yang digunakan untuk memihak pada suatu pasangan calon tertentu, lembaga penyelenggara seperti KPU dan BAWASLU yang kurang berkompeten dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyelenggara, serta keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai penutup atau "*master plan*" dalam rencana kecurangan pemilu 2024 ini.

Pembingkaian mengenai kecurangan dalam film ini, dianalisis menggunakan *framing* model William A. Gamson dan Andre Modigliani. Dalam dua perangkat dalam model *framing* ini, yakni perangkat pembingkaian (*framing devices*) membingkai bahwa kecurangan dalam proses menjelang pemilu 2024 merupakan suatu strategi sistematis dan merupakan ancaman serius dalam proses demokrasi. Hal ini ditunjukkan dari beberapa komponen dalam *framing devices*, yaitu ::

1. *Metaphors*, penggunaan metafora-metafora seperti "palu hakim patah berkeping-keping", gambar catur yang digunakan sebagai cover film, dan "bau anyir" merupakan gambaran kecurangan yang diatur secara sistematis untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang busuk dari orang-orang yang terlibat
2. Catchphrases, slogan-slogan dalam film seperti pemilu sedang tidak baik-baik saja dan skenario yang hanya dapat dilakukan oleh orang culas dan tahan malu, menggambarkan pemilu menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan tindakan kecurangan ini dianggap sebagai tindakan tidak bermoral
3. *Exemplar*, film ini menggunakan perbandingan data dan aturan, sehingga membingkai tindakan kecurangan adalah hal yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan, memanipulasi aturan yang ada, serta tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan
4. *Depiction*, kecurangan sebagai manipulasi dan pelanggaran terhadap hukum, serta

lemahnya sistem politik

5. *Visual Images*, terdapat gambar/foto/bagan yang menunjukkan bahwa kecurangan memang terjadi dan telah disusun atau dirancang.

Kemudian perangkat penalaran (*reasoning devices*) membingkai kecurangan sebagai perbuatan tidak bermoral dan tidak boleh didiamkan, sebab kecurangan berdampak signifikan terhadap proses demokrasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta terhadap lahirnya pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Hal ini ditunjukkan dari beberapa komponen dalam *reasoning devices*, yaitu :

1. *Roots*, film ini membingkai kecurangan pada pemilu sebagai tindakan merusak demokrasi yang memberikan dampak kekecewaan pada masyarakat serta turunnya kepercayaan masyarakat.
2. *Appeals to principle*, mengacu pada klaim moral bahwa tindakan kecurangan perlu mendapat perhatian dan kepedulian besar dari masyarakat untuk menentang/menyikapinya. Karena, dengan kepedulian masyarakat, maka masyarakat akan pintar dalam memilih pemimpin yang benar dan tulus.
3. *Consequences*, kecurangan suatu hal yang dapat merusak kepercayaan publik dalam proses pemilu/demokrasi yang sedang berjalan, meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap politisi maupun instansi politik, serta membuat publik mengambil sebuah tindakan seperti protes, demo, melakukan penuntutan.

Dengan demikian, *framing* kecurangan menjelang pemilu 2024 dalam film “Dirty Vote” dibingkai sebagai skenario yang telah dirancang dan disusun secara sistematis dengan melibatkan tokoh-tokoh dan instansi penting. Kecurangan sebagai suatu tindakan tidak bermoral dengan memanipulasi dan memainkan aturan yang ada untuk mendapatkan kursi kepemimpinan. Tindakan tidak bermoral ini, harus dilawan oleh masyarakat supaya sistem demokrasi dapat tetap tegak.

DAFTAR REFERENSI

Effendy, Onong Uchjana. (2003). *Ilmu, teori dan filsafat komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Eriyanto. (2002). *Analisis framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.

Aziz, A. K., Sumarah, N., & Ekoputro, W. (2022). Analisis framing pesan lingkungan dalam film dokumenter “The Story of Birthplace”. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 2(3), 443-454.

Elizamiharti, & Nelfira. (2024). Demokrasi di era digital: Tantangan dan peluang dalam partisipasi politik. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 61-72.

Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power: A study of the framing effects of elite cues and citizen predispositions. *American Journal of Political Science*, 33(2), 317-333.

Hubatullah, M. A., & Suni, E. K. (2023). Pengaruh film Spiderman No Way Home terhadap opini mahasiswa STIKOM InterStudi Jakarta. *Bandung Conference Series: Journalism*, 3(3), 332-335.

Lewis, B. K. (2010). Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students. *International Journal of Public Relation Society of America*.

Masyarrofah, U., Aulia, R. N., & Arifin, K. (2017). Analisis Framing Tentang Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan. *Jurnal Studi Al-Quran*, 13(1), 1-20.

Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi budaya dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Oktavianus, H. (2015). Penerimaan Penonton Terhadap Praktek Eksorsis Di Dalam Film

Conjuring. *Jurnal E-Komunikasi*, 3(2), 147-158.

Tsagarousianou, R. (1999). Electronic democracy: Rhetoric and reality. *Communications: The European Journal of Communication Research*, 24 (2), 189-208.

Carter, M. J. (2013). The Hermeneutics of Frames and Framing: An Examination of The Media's Construction of Reality. *Journal of Communication*.

Samsudin, D. (2019). Understanding The Models of Framing Analyses Approaches in Media Framing. In *Proceedings Of The Second International Conference on Social, Economy, Education and Humanity* (pp.385-389).

Rikarno, R. (2015). Film Dokumenter Sebagai Sumber Belajar Siswa. *Ekspresi Seni*, 17(1), 321-325.